

**RENCANA KERJA
(RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2024**

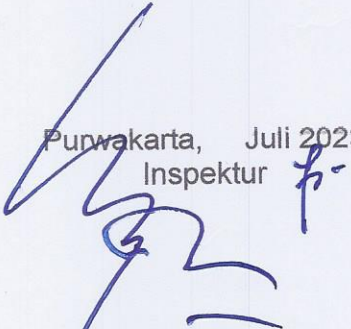


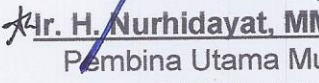
**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan Dokumen Perencana yang bersifat teknis operasional yang disusun berdasarkan potensi, kekuatan dan kemampuan organisasi, dan merupakan penjabaran teknis Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2024, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan untuk Tahun 2024.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Sedangkan keberhasilan pelaksanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak, baik secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan, termasuk ketersediaan Sumber Daya Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Juli 2023
Inspektur 


Ir. H. Nurhidayat, MM, CGCAE
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19640515 199203 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisa.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah.....	8
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat.....	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat.....	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	32
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat.....	32
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	36
4.1 Rencana Kerja.....	36
4.2 Pendanaan Indikatif	37
BAB V PENUTUP.....	48

DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat & Capaian Renstra s.d Tahun 2023.....	9
2.2	Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.....	17
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Purwakarta.....	22
2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	31
3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.....	33
4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kinerja merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan dalam menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strateginya khususnya aspek Pengawasan, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing Daerah sebagaimana dimaksud dalam visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025 yaitu “PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,3 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka mensinergiskan dan menselaraskan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025, yang merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) Tahun dalam masa

transisi, serta Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel . Tujuan ini ditetapkan dalam rangka merealisasikan pelaksanaan Misi RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat. Adapun Arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024 - 2026 adalah Reformasi Birokrasi yaitu dengan cara Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah, Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, Meningkatkan kapasitas dan integritas APIP dan Mendorong penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang taat aturan, bersih dan berintegritas. Sasaran yang akan dicapai adalah Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peningkatan pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal dan audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat, menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur, menindaklanjuti temuan pengawasan, meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparatur pengawasan instansi pemerintah, sistem pengendalian intern) mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja dan profesionalitas tenaga pemeriksa dan meningkatkan sistem informasi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) serta perbaiki kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum. Untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal, para aparatur pengawasan lebih meningkat kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan.

Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan

tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang mengamanatkan arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional yaitu :

1. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan : 1) kegiatan yang sifatnya pengawasan rutin; 2) pengawasan prioritas nasional dan atau daerah; 3) pengawalan Reformasi Birokrasi dan 4) penegakan Integritas; dan
2. Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Pungli) khususnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka perlu menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor ; 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta harus dapat melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paradigma Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu dan *Consuling Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning Sytem* (sebagai peringatan dini).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 229 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026
22. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.
23. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai upaya untuk memberikan arah, pedoman dan landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD, dengan mengoptimalkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Adapun tujuan yang diharapkan agar menjadi acuan terhadap serangkaian pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini dituangkan kedalam 5 (lima) Bab, secara ringkas sistematika penulisan adalah sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inpektorat Daerah

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini mengemukakan rencana kerja program dan sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam table matrik

BAB V : PENUTUP

BAB II

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan mereview pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) yang diuraikan sesuai dengan capaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan rencana kerja ditahun sebelumnya (2023) dapat di lihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Purwakarta

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023
					Target Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9) 11=(10/4)
6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan								
6.01	Inspektorat								
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini A	Opini B	Opini A	Opini A	100%	Opini A	-

6.01.01.2.01	Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-
6.01.01.2.01.01	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	2 dok	1 dok	2 dok	2 dok	-	-	5 dok	-	-
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok	1 dok	2 dok	2 dok	-	-	3 laporan	-	-
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Frekuensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 bln	14 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	14 bln	-	-
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Selesai Disusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Laporan	-	-
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-	-	-
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
6.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Rekonsiliasi dan Laporan BMD yang selesai disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-	-	-
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Laporan BMD yang selesai disusun dan	5 dok	1 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%	1 laporan	-	-

		dilaporkan																	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100%														
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pakaian khusus Inspektorat yang disediakan	65 ptg	1 keg	65 ptg														
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Diklat yang diikuti dalam rangka Pengembangan Tenaga Pengawas dan Aparatur Pengawas	5 diklat	1 keg	5 diklat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%														
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah alat/komponen instansi/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	10 jenis	1 keg	10 jenis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketersediaan peralatan dan peralatan kantor selama satu tahun terhadap kebutuhan	100%	100%	100%														
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketersediaan peralatan Rumah Tangga selama satu tahun terhadap kebutuhan	100%	10 item	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketersediaan logistik kantor selama satu tahun terhadap kebutuhan	100%	10 item	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun terhadap kebutuhan	100%	7 item	100%														
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat	Persentase Ketersediaan makanan dan minuman dalam rangka fasilitas kunjungan tamu selama satu tahun terhadap kebutuhan	100%	1 keg	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase terlaksananya	100%	1 keg	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi selama satu tahun terhadap kebutuhan																		
6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya alat untuk memperkuat penangkapan sinyal wifi pada computer	2 jenis	-	2 jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang dibutuhkan	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 2 (dua) Operasional Pengawasan	5 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat	2 jenis	2 jenis	2 jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terseleksikannya pembayaran penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 rekening	4 rekening	4 rekening	2	rekening	50%	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 keg	1 keg	1 keg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Frekuensi pembayaran gaji/tenaga piket malam dikantor Inspektorat Daerah	12 bln	1 keg	12 bln	12 bln	100%	100%	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pembayaran gaji tenaga PTT di Inspektorat Daerah																		
		Jumlah Frekuensi pembayaran premi asuransi BPJS Kesehatan Non PNS yang dibayarkan																		
		Jumlah petugas kebersihan kantor yang dibutuhkan																		
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Meningkatnya Kualitas aset Barang Milik daerah Perangkat	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kegiatan Pengawasan yang Pelaksanaannya bekerja sama dengan tenaga ahli	2 keg	1 keg	2 keg	1 keg	2 keg	100 %	2 keg	-	-
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti	90%	1 keg	80%	80%	100 %	5 dokumen	-	-	-
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penanganan Kasus Kerugian Negara/Daerah dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7 kasus	7 kasus	7 kasus	2 kasus	2 kasus	7 kasus	1 laporan	-	-
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah kasus yang selesai ditangani	2 kasus	1 keg	2 kasus	2 kasus	100 %	1 laporan	-	-	-
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat / Pelimpahan Kaus dari APH yang dilakukan Audit dengan tujuan tertentu	5 kasus	1 keg	5 kasus	5 kasus	100 %	1 laporan	-	-	-
6.01.03	Program Perumusan kebijakan , pendampingan Dan asistensi	Peningkatan Kapabilitas APIP	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	-	-
		Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	2 opd	2 opd	2 opd	2 opd	2 opd	2 opd	2 opd	-	-
		Persentase OPD yang mendapatkan nilai 75% dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	-	-
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Inspektorat								-	-
6.01.03.2.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-

6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	-	-	-	100%	-	-
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya level kapabilitas APIP	level 3	1 keg	level 3	level 3	level 3	100 %	20 perangkat daerah	-
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dilakukan penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas	14 opd	1 keg	14 opd	14 opd	14 opd	100%	10 perangkat daerah	-
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Jumlah OPD Dengan Nilai Diatas 75% Dalam Pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Korupsi	90%	1 keg	85%	-	-	-	-	-
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang Dilakukan Survei Penilaian Integritas	30 OPD	-	20 OPD	20 OPD	20 OPD	100%	10 perangkat daerah	-

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta pada Tahun Anggaran 2022 menerima alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta, dengan jumlah Anggaran Perubahan sebesar Rp.31.600.872.503,- terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Anggaran dalam Belanja Operasi terdiri dari Belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa dengan besaran anggaran Rp. 29.163.235.635,- terealisasi Rp. 26.768.728.467,-

b. Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 432.977.450,- terealisasi Rp. 431.006.800,-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2018-2023 berdasarkan capaian kinerja tahun 2022 dan perkiraan realisasi capaian kinerja tahun 2023 serta proyeksi capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	B	BB	BB	A	A	-	-	BB	A	A	A		
2.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	90	90	90	90	90	-	-	-	94,71	65,09				
3.	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD yang telah dilaksanakan	OPD	46	46	46	46	46	46	46	46	46	47	47	-		

9..	Persentase OP yang mendapatkan nilai diatas 75% dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan Korupsi	%	90	75	-	80	85	90	-	-	37,50	100	100	100
-----	--	---	----	----	---	----	----	----	---	---	-------	-----	-----	-----

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2022 s.d 2023 diproyeksikan tercapai dari indikator yang telah ditargetkan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik dan bersih.
2. Peningkatan kapabilitas APIP,
3. Kesadaran obrik dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan lembaga APIP dan BPK masih belum optimal terutama menyangkut pengembalian keuangan negara/daerah.
4. Tuntutan kepada perangkat daerah untuk melaksanakan implementasi SAKIP.
5. Minimnya SDM Pengawasan khususnya JFA dan JF P2UPD dan tenaga administrasi lainnya.
6. Minimnya SDM Pengawasan yang bersertifikat di bidang Investigasi.
7. Terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan operasional pengawasan.
8. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional pengawasan masih terbatas.
9. Target tahunan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) belum tercapai.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Alokasi anggaran kegiatan untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 29.596.213.103,- (*dua puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga rupiah*). Apabila mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk pemerintah daerah kabupaten/kota yang APBD Tahun 2023 diatas Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan untuk mendanai program dan kegiatan pengawasan

untuk APBD paling sedikit sebesar **0,50%** (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah. Apabila dilihat dari anggaran yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, maka alokasi anggaran tersebut masih rendah/kurang. Akan tetapi, Inspektorat Daerah berupaya maksimal dan optimal untuk merealisasikan/mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD maupun RPD.

Untuk itu kami mengajukan usulan untuk alokasi dana/pagu indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sesuai dengan Rancangan Awal Rencana RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dengan total usulan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sebesar Rp. 30.124.030.316,-,- (*Tiga puluh milyar seratus dua puluh empat juta tiga puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah*).

Secara lengkap dapat dilihat tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Purwakarta.

Tabel 2.4

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Purwakarta

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Capaian Saking Perangkat Daerah	5	25,699,030,316	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kab. Purwakarta	Capaian Saking Perangkat Daerah; Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	10	11	12
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang disusun	3 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang disusun	5 Dokumen	26.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	15.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											

3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 org/ Bulan	21,729,530,316	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 org/ Bulan	21,729,530,316
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20,000,000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Purwakarta	Jml lap keuangan bulanan/triwulan/ semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran skpd	18 Laporan	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Purwakarta	Jml keuangan bulanan/triwulan/ semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran skpd	18 Laporan	15,000,000
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah										
6	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	10,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta	laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	10,000,000
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	10,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	10,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										

8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Purwakarta	Jml Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	216.000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Purwakarta	Jml Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	216.000,000
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Purwakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	380.000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Purwakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	380.000,000
Administrasi Umum dan Perangkat Daerah										
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang disediakan	1 Paket	50.000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang disediakan	1 Paket	65.000,000
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	300.000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	810.000,000
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	75.000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100.000,000
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	235.000,000
14	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	1 Paket	200.000,000	Pengadaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	1 Paket	130.000,000
15	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	230.000,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	100.000,000
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 Laporan	150.000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 Laporan	150.000,000

	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas atau Dinas Jabatan Dipelihara dan dibayarkan pajaknya		Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan							
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak, Dana Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Purwakarta	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dana Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000	24 Unit	24 Unit	60.000.000			
25	Pemeliharaan dan Peralatan Mesin Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	Kab. Purwakarta	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000	150 Unit	150 Unit	36.000.000			
26	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Purwakarta	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	100.000.000	1 unit	1 unit	100.000.000			
27	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Kab. Purwakarta	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	50.000.000	1 unit	1 unit	50.000.000			
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kab. Purwakarta	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern	Kab. Purwakarta	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.280.000.000	3 Level ; 80 Persen; 10 Temuan; 100 Persen	3 Level ; 80 Persen; 10 Temuan; 100 Persen	3.600.000.000	Opini Penilaian Sakip Kabupaten; LKPD Kabupaten;		

			Pemerintah (APIP), Persentase tindak lanjut temuan, Jumlah temuan BPK, Persentase rivi laporan/dokumen yang dilaksanakan					Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten		
Penyelenggaraan Pengawasan Internal										
28	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	47 Laporan	950,000,000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	47 Laporan	1,100,000,000
29	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	47 Laporan	1,100,000,000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	47 Laporan	1,000,000,000
30	Reviu Kinerja Laporan	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Reviu Kinerja	1 Laporan	120,000,000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Reviu Kinerja	1 Laporan	85,000,000
31	Reviu Keuangan Laporan	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Reviu Keuangan	1 Laporan	20,000,000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Reviu Keuangan	1 Laporan	25,000,000
32	Pengawasan Desa	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	65 Laporan	500,000,000	Pengawasan Desa	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	65 Laporan	500,000,000
33	Kerjasama Pengawasan Internal		Jml kesepakatan pengawasan internal yg dibentuk	1 kesepakatan	15,000,000	Kerjasama Pengawasan Internal		Jml kesepakatan pengawasan internal yg dibentuk	1 kesepakatan	15,000,000
34	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	4 Dokumen	300,000,000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	4 Dokumen	500,000,000

	Pemeriksaan APIP	BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu							
35	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	2 Laporan	25,000,000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Purwakarta Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani 2 Laporan 25,000,000
36	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	250,000,000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Purwakarta Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 5 Laporan 350,000,000
III	Program Prumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kab. Purwakarta	Capaian MCP KPK, Jumlah PD yang menerapkan Zone Integritas	81 Persen; 2 PD	1,145,000,000	Program Prumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kab. Purwakarta Capaian MCP KPK, Jumlah PD yang sudah menerapkan Zone Integritas 81 Persen; 2 PD 1,635,000,000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan							
37	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Kab. Purwakarta	Jml rekomendasi kebijakan Teknis Bidang Fasilitas Pengawasan yg disusun	1 rekomendasi	25,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Kab. Purwakarta Jml rekomendasi kebijakan Teknis Bidang Fasilitas Pengawasan yg disusun 1 rekomendasi 25,000,000
Pendampingan dan Asistensi							
38	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	47 Perangkat Daerah	750,000,000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purwakarta Teraksananya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 47 Perangkat Daerah 1,100,000,000
39	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Purwakarta	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan,	15 Perangkat Daerah	100,000,000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian	Kab. Purwakarta Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, 15 Perangkat Daerah 30,000,000

40	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Purwakarta	Asistensi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jml kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 kegiatan	120,000,000	Reformasi Birokrasi	Kab. Purwakarta	Jml kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 kegiatan	80,000,000		
41	Pendampingan, dan Asistensi Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Purwakarta	Asistensi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi Verifikasi Penegakan Integritas	47 Perangkat Daerah	150,000,000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Purwakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi Verifikasi Penegakan Integritas	47 Perangkat Daerah	400,000,000	Kegiatan Prioritas	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Purwakarta melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan yang menjadi kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Program dan kegiatan Inspektorat Daerah hanya lingkup pembinaan dan pengawasan reguler (PKPT) serta pengembangan aparatur pengawasan sehingga usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung tidak ada. Akan tetapi masyarakat dapat mengajukan laporan (Dumas) atas indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
					Tidak ada program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan masyarakat dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Khususnya pada Tugas-tugas di Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pengawasan secara nasional untuk Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023. Perencanaan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta melalui berbagai kegiatan dalam satu tahun. Dalam Rencana Kerja (Renja) ditetapkan rencana capaian untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat program dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam satu tahun.

Adapun penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta di Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	2 OPD
			2. Tingkat Kapabilitas APIP/Internal Audit Capability Model (IACM)	Level 3
			3. Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP
			4. Persentase tindak lanjut temuan	80%
			5. Persentase Capaian Sakip Perangkat Daerah yang mendapat predikat minimal B	85%

3.3. Program Dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan terhadap pencapaian kinerja tahun 2023 terbagi dalam 3 program, 10 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Program dan kegiatan inilah yang mendukung pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Program dan kegiatan tersebut yaitu:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota

- I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- III. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- V. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- VI. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
- VII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Program Penyelenggaraan Pengawasan

- I. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3) Reviu Laporan Kinerja
 - 4) Reviu Laporan Keuangan
 - 5) Pengawasan Desa

- 6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

II. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

I. Pendampingan dan Asistensi

- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Biroksi
- 3) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan integritas

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2024 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi satuan kerja pelaksana program, Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Kebijakan Umum APBD. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh satuan kerja mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalian dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat maupun dunia usaha.

Pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan Kabupaten/Kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkauan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta

untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan baik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

4.2. Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta pada Renja Tahun 2024, setiap tahunnya direncanakan mengalami peningkatan sebanyak rata-rata 10% setiap tahunnya. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Tabel 4.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Purwakarta
Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							
6	Inspektorat Daerah				30,124,030,316			30,552,994,595
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Saking Perangkat Daerah,		Predikat A	25,699,030,316		Predikat A	26,039,994,595
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		100 %	30,000,000		100 %	30,000,000
6	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	3 Dokumen	15,000,000	APBD	3 Dokumen	15,000,000
6	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	Purwakarta	1 dokumen	15,000,000	APBD	1 dokumen	15,000,000

6	1	1	2.02	1	2.02	1	22,059,494,595	100%	21,759,530,316	22,029,494,595	100%	22,059,494,595	75 org/ Bulan	APBD	18 Laporan	15,000,000	15,000,000
6	1	1	2.02	1	2.02	1	22,059,494,595	100%	21,759,530,316	22,029,494,595	100%	22,059,494,595	75 org/ Bulan	APBD	18 Laporan	15,000,000	15,000,000
6	1	1	2.02	5	2.02	5	15,000,000	100%	15,000,000	15,000,000	100%	15,000,000	1 Laporan	APBD	1 Laporan	15,000,000	15,000,000
6	1	1	2.02	7	2.02	7	15,000,000	100%	15,000,000	15,000,000	100%	15,000,000	18 Laporan	APBD	18 Laporan	15,000,000	15,000,000

6	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purwakarta	100%	20,000,000	100%	20,000,000
6	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta	5 Laporan	10,000,000	5 Laporan	10,000,000
6	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta	7 Laporan	10,000,000	7 Laporan	10,000,000
6	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	596,000,000	100 %	600,000,000
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jml paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Purwakarta	1 paket	216,000,000	1 paket	220,000,000
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Purwakarta	22 Orang	380,000,000	25 Orang	380,000,000
6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan		100%	1,195,000,000	100%	1,292,000,000

6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purwakarta	1 Paket	50,000,000	ABPD	1 Paket	50,000,000
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Purwakarta	1 Paket	275,000,000	APBD	1 Paket	275,000,000
6	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Purwakarta	1 Paket	75,000,000	APBD	1 Paket	80,000,000
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jml paket bahan logistik ktr yg disediakan	Purwakarta	1 Paket	200,000,000	APBD	1 Paket	250,000,000
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Purwakarta	1 Paket	200,000,000	APBD	1 Paket	220,000,000
6	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Purwakarta	12 Laporan	230,000,000	APBD	12 Laporan	240,000,000
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	12 Laporan	150,000,000	APBD	12 Laporan	160,000,000
6	1	1	2.06	11	Dukungan Sistem Berbasis Elektronik pada Pelaksanaan	Jml dokumen Dukungan Pelaksanaan	Purwakarta	1 dokumen	15,000,000	APBD	1 dokumen	17,000,000

					Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah yang dibutuhkan.	50%	700,000,000	60%	600,000,000							
6	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	jml unit pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yg disediakan	16 unit	700,000,000	11 unit	600,000,000	APBD						
6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah yang dibutuhkan	3 Kegiatan	870,000,000	3 Kegiatan	840,000,000							
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,500,000	1 Laporan	3,500,000	APBD						
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	140,000,000	60 Laporan	140,000,000	APBD						
6	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jml laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg disediakan	2 Laporan	60,000,000	2 Laporan	70,000,000	APBD						

6	1	1	2.08	4	Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	Jasa Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Purwakarta	12 Laporan	650,000,000	APBD	12 Laporan	680,000,000
6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Barang daerah Perangkat Daerah		80 %	545,000,000		85 %	545,000,000
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Pemeliharaan, dan Perorangan Kendaraan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Purwakarta	22 Unit	270,000,000	APBD	34 Unit	270,000,000
6	1	1	2.09	2	Penyediaan Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Purwakarta	24 Unit	80,000,000	APBD	28 Unit	80,000,000
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jml Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yg dipelihara	Purwakarta	150 Unit	45,000,000	APBD	155 Unit	45,000,000
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Purwakarta	1 unit	100,000,000	APBD	1 unit	100,000,000
6	1	1	2.09	11	Pemeliharaan /Rehabilitasi	Jumlah Sarana	Purwakarta	1 unit	50,000,000	APBD	1 unit	50,000,000

6	1	2				Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Purwakarta	3 Level	3,280,000,000	APBD	3 Level	3,378,000,000
						Program Penyelenggaraan Pengawasan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		80 Persen			80 Persen	
							Persentase tindak temuan		10 Temuan			9 Temuan	
							Jumlah temuan BPK		100 Persen			100 Persen	
6	1	2	2.01			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase riviur laporan/dokumen yang dilaksanakan		112 SKPD dan Desa	3,005,000,000		112 SKPD dan Desa	3,103,000,000
							Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terutama dalam pengelolaan anggaran baik SKPD maupun di Desa						
6	1	2	2.01	1		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Purwakarta	47 Laporan	950,000,000	APBD	47 Laporan	950,000,000
6	1	2	2.01	2		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Purwakarta	47 Laporan	1,100,000,000	APBD	47 Laporan	1,200,000,000

6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Kearifan	Keuangan Pemerintah Daerah	Purwakarta	1 Laporan	120,000,000	APBD	1 Laporan	120,000,000
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Kearifan	Keuangan Pemerintah Daerah	Purwakarta	1 Laporan	20,000,000	APBD	1 Laporan	18,000,000
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Kearifan	Keuangan Pemerintah Daerah	Purwakarta	65 Laporan	500,000,000	APBD	65 Laporan	500,000,000
6	1	2	2.01	6	Kerjasama Internal	Kearifan	Keuangan Pemerintah Daerah	Purwakarta	1 kesepakatan	15,000,000	APBD	1 kesepakatan	15,000,000
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kearifan	Keuangan Pemerintah Daerah	Purwakarta	4 Dokumen	300,000,000	APBD	4 Dokumen	300,000,000
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Dengan Tujuan Tertentu	Kearifan	Keuangan Pemerintah Daerah		7 kasus	275,000,000		7 Kasus	275,000,000
6	1	2	2.02	1	Penanganan Kerugian Negara/Daerah dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kearifan	Keuangan Pemerintah Daerah		2 Laporan	25,000,000	APBD	1 Laporan	25,000,000

6	1	2	2.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Negara/Daerah yang Ditangani	Purwakarta	5 Laporan	250,000,000	APBD	1 Laporan	250,000,000
6	1	3		3	Program Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Capaian MCP KPK	Purwakarta	81 Persen	1,145,000,000		81 Persen	1,135,000,000
6	1	3	2.01	3	Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah PD yang sudah menerapkan Zone Integritas	Purwakarta	2 PD			2 PD	
6	1	3	2.01	3	Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Inspektorat	Purwakarta	72%	25,000,000	APBD	74%	25,000,000
6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan	Jml rekomendasi kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yg disusun	Purwakarta	1 rekomendasi	25,000,000	APBD	1 rekomendasi	25,000,000
6	1	3	2.02	3	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Purwakarta	100 %	1,120,000,000		100 %	1,110,000,000
6	1	3	2.02	1	Pendampingan Asistensi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi	Purwakarta	47 Perangkat Daerah	750,000,000	APBD	47 Perangkat Daerah	750,000,000

6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Urusan Pemerintahan Daerah	Purwokarta	15 Perangkat Daerah	100,000,000	APBD	15 Perangkat Daerah	100,000,000
6	1	1	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jml kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		6 kegiatan	120,000,000		6 kegiatan	110,000,000
6	1	1	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Purwokarta	47 Perangkat Daerah	150,000,000	APBD	47 Perangkat Daerah	150,000,000

BAB V PENUTUP

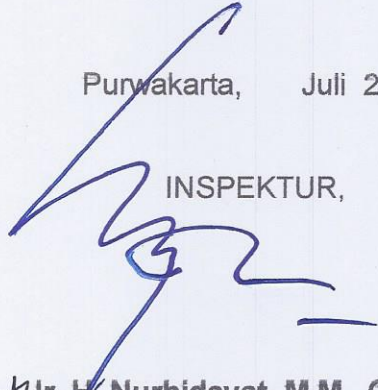
Sesuai maksud dan tujuan yang diinginkan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai upaya untuk memberikan arah, pedoman dan landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD, dengan mengoptimalkan kemampuan sumber daya yang tersedia maka Renja ini juga menjadi bagian tahapan proses perencanaan tahunan yang berkelanjutan dan sistematis dari Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Renja ini kami berupaya untuk menelaah dan memperhatikan kondisi internal dan eksternal Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang selalu berkembang dan diselaraskan dengan langkah-langkah yang dilakukan sesuai visi Kabupaten Purwakarta yaitu :“PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”

Demikian pula dalam pencapaian Sasaran, Strategis Organisasi, kami juga berupaya melalui Renja Tahun 2024 untuk mereviu Sasaran Kinerja agar memenuhi karakteristik, spesifik, terukur, jelas, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan tepat waktu.

Purwakarta, Juli 2023

INSPEKTUR,


Ir. H. Nurhidayat, M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19640515 199203 1 008